

FILSAFAT PENDIDIKAN HUMANIS DAN RELEVANSINYA DENGAN PENCEGAHAN KORUPSI

Siti Rokhanah¹, Mustopa², Nasikhin³

Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Walisongo

Email penulis:

¹strokhanah196@gmail.com

²mustopa@walisongo.ac.id

³nasikhin@walisongo.ac.id.

ABSTRACT

This study aims to explore the relevance of humanist educational philosophy in preventing corruption by emphasizing character formation based on moral and ethical values in the education system. The method used in this study is a qualitative approach with descriptive analysis, which examines theories of educational philosophy, principles of humanist education, and their implications for the formation of student integrity. The findings of the study indicate that humanist education can form critical awareness, empathy, and a sense of social responsibility that are essential in preventing corrupt practices, through the integration of ethical values in the curriculum and dialogic learning practices. The contribution of this study is to provide new insights into the importance of a humanist approach in education as a preventive strategy in eradicating corruption, while also suggesting curriculum reform and strengthening the moral capacity of educators to create a generation with integrity and responsibility.

Keywords: *Philosophy of Education, Moral Character, Critical Awareness, Corruption Prevention, Humanistic Education.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi relevansi filsafat pendidikan humanis dalam pencegahan korupsi dengan menekankan pada pembentukan karakter yang berbasis nilai-nilai moral dan etika dalam sistem pendidikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, yang mengkaji teori-teori filsafat pendidikan, prinsip pendidikan humanis, serta implikasinya terhadap pembentukan integritas peserta didik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendidikan humanis dapat membentuk kesadaran kritis, empati, dan rasa tanggung jawab sosial yang esensial dalam mencegah praktik korupsi, melalui integrasi nilai-nilai etis dalam kurikulum dan praktik pembelajaran yang dialogis. Kontribusi penelitian ini adalah memberikan wawasan baru tentang pentingnya pendekatan humanis dalam pendidikan sebagai strategi preventif dalam pemberantasan korupsi, sekaligus menyarankan reformasi kurikulum dan penguatan kapasitas moral para pendidik untuk menciptakan generasi yang berintegritas dan bertanggung jawab.

Kata kunci: *Filsafat Pendidikan, Karakter Moral, Kesadaran Kritis, Pencegahan Korupsi, Pendidikan Humanis.*

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan persoalan multidimensi yang tidak hanya berkaitan dengan kerugian negara secara ekonomi, melainkan juga menyentuh aspek moral, budaya, dan pendidikan suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, korupsi telah menjadi fenomena yang nyaris sistemik,

merasuki berbagai lapisan birokrasi, lembaga publik, bahkan lembaga pendidikan yang sejatinya menjadi garda depan pembentukan karakter. Upaya pemberantasan korupsi selama ini banyak difokuskan pada aspek penegakan hukum, tetapi akar permasalahan korupsi tidak

bisa dilepaskan dari krisis nilai dan lemahnya fondasi pendidikan karakter. Oleh karena itu, pendekatan filosofis dan edukatif sangat dibutuhkan untuk melihat persoalan korupsi secara lebih mendalam dan menyeluruh (Muslich, 2022).

Pendidikan, dalam dimensi filsafat, tidak hanya dipandang sebagai proses transfer pengetahuan, tetapi sebagai upaya pemanusiaan. Dalam konteks ini, filsafat pendidikan humanis hadir sebagai kritik terhadap pendekatan pendidikan yang terlalu teknokratis dan terlepas dari aspek moral. Pendidikan humanis mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, pembebasan, kesadaran diri, serta tanggung jawab sosial. Melalui pendekatan ini, peserta didik tidak hanya dibentuk menjadi individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kedewasaan moral yang kokoh. Nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, empati, dan keberanian untuk mengatakan kebenaran menjadi inti dari pendidikan humanis.

Kegagalan pendidikan dalam mencegah korupsi seringkali disebabkan oleh dominasi pendidikan yang berorientasi pada capaian akademik dan prestasi individualistik semata, tanpa memberikan ruang yang cukup bagi pembentukan nilai dan karakter. Dalam sistem seperti ini, integritas seringkali dikorbankan demi ambisi pragmatis dan kepentingan jangka pendek. Padahal, pendidikan semestinya menjadi alat peradaban yang mampu mencetak manusia berkesadaran etis dan memiliki komitmen moral terhadap kehidupan bersama. Pendidikan yang sekadar mengasah kecerdasan kognitif tanpa mengakar pada nilai-nilai kemanusiaan akan melahirkan generasi yang rentan terhadap penyimpangan moral, termasuk tindakan korupsi.

Dalam konteks filsafat pendidikan humanis, manusia dipandang sebagai makhluk bebas dan bertanggung jawab (Nursikin, 2016). Pendidikan harus menjadi ruang pembebasan dari ketertindasan nilai-nilai palsu dan dominasi sistem yang tidak adil. Konsep

ini sejatinya sangat relevan dalam menghadapi problematika korupsi, di mana tindakan koruptif sering kali dilakukan dalam situasi sistem yang permisif dan budaya yang membiarkan. Melalui pendidikan humanis, peserta didik didorong untuk menjadi subjek aktif yang berpikir kritis, mampu menilai baik dan buruk secara mandiri, serta berani mengambil posisi etis dalam kehidupan sosialnya. Inilah titik temu antara filsafat pendidikan humanis dan upaya preventif terhadap praktik korupsi.

Lebih jauh, pencegahan korupsi memerlukan pembentukan habitus moral yang kuat sejak usia dini. Pendidikan bukan sekadar menyampaikan slogan anti-korupsi, tetapi harus melibatkan internalisasi nilai-nilai luhur secara konsisten dan sistemik. Pendidikan humanis membuka ruang bagi pendekatan yang menyentuh kesadaran terdalam manusia, bukan sekadar menanamkan ketakutan terhadap hukuman. Transformasi moral ini menjadi elemen penting dalam membangun budaya anti-korupsi yang berkelanjutan dan tidak tergantung pada pengawasan eksternal semata. Dalam kerangka ini, reformasi pendidikan yang berorientasi pada humanisme menjadi prasyarat bagi lahirnya generasi yang bersih, jujur, dan berakhlak mulia.

Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep dan prinsip-prinsip filsafat pendidikan humanis serta menggali relevansinya dalam pencegahan korupsi di Indonesia. Penulis meyakini bahwa pendidikan yang mengedepankan pemanusiaan dan kesadaran etis mampu menjadi pondasi bagi perubahan sosial yang lebih adil dan berintegritas. Melalui pembahasan ini, diharapkan lahir kesadaran baru bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya persoalan hukum atau kebijakan, tetapi juga merupakan panggilan moral yang harus dijawab melalui reformasi pendidikan berbasis nilai-nilai humanisme.

Urgensi penerapan pendidikan humanis dalam kurikulum nasional semakin mendesak, mengingat tingginya tingkat korupsi di Indonesia dan perlunya pembentukan karakter antikorupsi sejak dini. Meskipun upaya pemberantasan korupsi terus dilakukan, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2024 hanya mencapai skor 37, menempatkan Indonesia pada peringkat ke-99 dari 180 negara, menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi masalah serius di negara ini. Lebih lanjut, sebuah studi yang dilakukan terhadap pelajar di Kota Malang mengungkapkan bahwa pemahaman siswa tentang korupsi berbanding lurus dengan kepatuhan mereka terhadap peraturan sekolah; semakin tinggi pemahaman tentang korupsi, semakin tinggi pula kepatuhan terhadap aturan. Temuan ini menegaskan bahwa pendidikan yang menanamkan nilai-nilai antikorupsi dapat membentuk perilaku positif di kalangan pelajar. Oleh karena itu, integrasi pendidikan humanis yang menekankan pada nilai-nilai moral dan etika dalam kurikulum nasional menjadi langkah strategis untuk membentuk generasi yang berkarakter kuat dan mampu menolak praktik korupsi sejak usia dini.

TINJAUAN PUSTAKA

Filsafat pendidikan humanis merupakan cabang pemikiran dalam filsafat pendidikan yang menekankan pada hakikat manusia sebagai makhluk yang memiliki akal budi, kebebasan, dan tanggung jawab moral. Secara umum, pendidikan humanis bertujuan untuk memanusiakan manusia (humanisasi), mengembangkan potensi diri secara utuh, serta menumbuhkan kesadaran individu terhadap perannya dalam kehidupan sosial. Tokoh-tokoh seperti Paulo Freire, Carl Rogers, dan John Dewey banyak memberikan kontribusi terhadap pengembangan pendidikan humanis melalui pendekatan yang menekankan pada dialog, pengalaman pribadi, serta

penghormatan terhadap martabat manusia. Freire, misalnya, dalam karyanya *Pedagogy of the Oppressed* menyatakan bahwa pendidikan harus menjadi sarana pembebasan, bukan penindasan. Sementara itu, Carl Rogers menekankan pentingnya hubungan empatik dan penerimaan tanpa syarat dalam proses pembelajaran, agar peserta didik merasa dihargai dan mampu berkembang secara autentik (Asy'arie, 2024).

Dalam konteks teoritis, pendidikan humanis dipahami sebagai respons terhadap model pendidikan tradisional yang bersifat otoriter dan mekanistik. Pendidikan bukanlah proses menjejali informasi, tetapi dialog yang membangun kesadaran kritis dan pemahaman nilai-nilai kemanusiaan. Teori humanistik dalam pendidikan berlandaskan pada asumsi bahwa setiap manusia memiliki potensi aktualisasi diri yang harus didukung melalui lingkungan pendidikan yang kondusif, menghargai kebebasan berpikir, dan mendorong tanggung jawab personal. Nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, empati, kesetaraan, dan keberanian moral menjadi fondasi utama dalam pendidikan humanis. Prinsip ini selaras dengan pemikiran John Dewey yang menekankan bahwa pendidikan harus berakar pada pengalaman nyata peserta didik dan diarahkan untuk membentuk warga negara yang demokratis, partisipatif, dan bertanggung jawab terhadap kehidupan sosial (Siswadi, 2023).

Sejalan dengan itu, permasalahan korupsi dapat ditinjau sebagai bentuk degradasi moral dan kegagalan pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai etis secara mendalam. Korupsi tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum, tetapi juga merupakan cerminan dari kerusakan karakter dan hilangnya kesadaran moral dalam bertindak. Dalam kerangka ini, teori etika seperti *virtue ethics* dari Aristoteles yang menekankan pembentukan kebiasaan baik (*habit*) sangat relevan. Pendidikan humanis dapat

menjadi wahana untuk membentuk karakter tersebut secara sistematis. Selain itu, pendekatan *critical pedagogy* juga memberikan kerangka untuk melihat korupsi sebagai hasil dari struktur sosial yang timpang dan sistem pendidikan yang gagal membangkitkan kesadaran kritis terhadap ketidakadilan dan penyimpangan etis di masyarakat (Arsyad dkk., 2024) . Dengan menggabungkan pendekatan humanistik dan kritis, filsafat pendidikan dapat menawarkan solusi pemecahan masalah korupsi dari hulu, yaitu sejak proses pembentukan individu dalam dunia pendidikan. Diperlukan pemahaman konseptual yang utuh bahwa korupsi tidak bisa diberantas hanya melalui regulasi dan sanksi hukum, tetapi harus dicegah melalui pembinaan kesadaran etis sejak dini. Pendidikan humanis memberikan prinsip dasar yang dapat dijadikan fondasi pembentukan karakter antikorupsi: penghargaan terhadap kebenaran, integritas pribadi, tanggung jawab sosial, dan keberanian moral untuk melawan penyimpangan. Oleh karena itu, dalam menjawab tantangan korupsi, perlu direkonstruksi kembali orientasi pendidikan menuju model yang lebih humanistik, reflektif, dan berorientasi pada pembangunan etika publik yang kuat dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis. Fokus utama penelitian ini adalah penelusuran secara mendalam terhadap konsep filsafat pendidikan humanis serta analisis terhadap relevansinya dalam upaya pencegahan korupsi melalui pembentukan kesadaran etis dan karakter peserta didik. Sumber-sumber data diperoleh dari berbagai literatur akademik, seperti buku-buku filsafat pendidikan, jurnal ilmiah, artikel konseptual, serta dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan pendidikan karakter dan kebijakan

antikorupsi. Pengumpulan data dilakukan melalui telaah pustaka yang sistematis dan kritis terhadap karya-karya tokoh seperti Paulo Freire, Carl Rogers, John Dewey, serta pemikiran-pemikiran tentang etika dan moralitas dalam pendidikan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan pendekatan hermeneutik, yaitu penafsiran makna teks secara mendalam dalam konteks permasalahan sosial, khususnya praktik korupsi yang terjadi di Indonesia .

Langkah analisis dilakukan melalui tiga tahap, yakni: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi informasi yang relevan dengan variabel utama, yaitu pendidikan humanis dan pencegahan korupsi. Selanjutnya, penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi analitis untuk menguraikan keterkaitan antara prinsip-prinsip pendidikan humanis dan upaya preventif terhadap tindakan koruptif. Penarikan kesimpulan didasarkan pada sintesis teori dan realitas sosial, dengan tujuan merumuskan kontribusi teoretis filsafat pendidikan humanis dalam mendorong transformasi nilai dan karakter peserta didik sebagai bagian dari strategi jangka panjang pemberantasan korupsi. Dengan metode ini, penelitian tidak hanya bertujuan menjelaskan konsep secara teoritis, tetapi juga memberikan tawaran konkret bagi pengembangan kurikulum dan kebijakan pendidikan yang lebih humanis dan berorientasi pada pembentukan integritas moral.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Filsafat Pendidikan Humanis

Filsafat pendidikan humanis lahir dari kesadaran bahwa pendidikan sejatinya harus berfokus pada manusia sebagai pusat dan tujuan utama proses pendidikan. Berbeda dengan pendekatan behavioristik yang memandang manusia sebagai objek yang perlu dikondisikan, pendidikan humanis melihat manusia sebagai subjek aktif yang memiliki potensi, kebebasan,

dan kehendak untuk tumbuh secara utuh. Dalam pandangan ini, pendidikan bukan sekadar transmisi pengetahuan dari guru kepada murid, melainkan proses pembentukan eksistensi manusia secara menyeluruh: jasmani, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Oleh karena itu, pendidikan humanis menempatkan nilai-nilai kemanusiaan seperti martabat, kebebasan berpikir, penghargaan terhadap keberagaman, dan tanggung jawab moral sebagai elemen mendasar dalam proses pembelajaran (Nahdiyah dkk., 2023).

Tokoh-tokoh penting seperti Carl Rogers dan Paulo Freire memberikan dasar pemikiran yang kuat bagi filsafat pendidikan humanis. Carl Rogers mengemukakan bahwa pendidikan harus berorientasi pada peserta didik sebagai pribadi yang unik dan bermakna, bukan sebagai bagian dari sistem yang seragam. Ia menekankan pentingnya hubungan yang empatik antara guru dan murid, serta lingkungan belajar yang mendukung aktualisasi diri. Sementara itu, Paulo Freire dalam *Pedagogy of the Oppressed* menolak model pendidikan "gaya bank" yang menempatkan siswa sebagai wadah kosong yang harus diisi. Freire justru mengusulkan model pendidikan dialogis yang membangkitkan kesadaran kritis (*conscientization*), di mana siswa diajak memahami realitas sosial dan diberdayakan untuk mengubahnya secara etis dan adil (Danu, 2021).

Dalam kerangka ini, prinsip dasar pendidikan humanis meliputi pengakuan terhadap kebebasan dan otonomi individu, penghargaan terhadap pengalaman hidup, pengembangan kesadaran diri dan tanggung jawab sosial, serta pembentukan nilai-nilai etis. Pendidikan bukan hanya alat untuk mencapai kesuksesan akademik atau ekonomi, tetapi juga sebagai sarana untuk membentuk manusia yang memiliki prinsip, jujur, dan memiliki komitmen terhadap keadilan sosial. Oleh karena itu, pendekatan humanistik menolak model pendidikan yang kaku, otoriter, dan

terfokus pada hafalan semata. Pendidikan yang sejati harus membangun dialog, refleksi kritis, dan penghayatan terhadap nilai-nilai kebaikan universal yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.

Dalam konteks Indonesia, penerapan filsafat pendidikan humanis menjadi semakin penting di tengah krisis nilai dan menjamurnya praktik korupsi yang mencerminkan kegagalan pendidikan karakter. Pendidikan humanis menawarkan paradigma yang menyentuh akar persoalan, yakni pembentukan manusia yang sadar, bebas, dan menjalankan kewajibannya terhadap kehidupan bersama. Dengan menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, empati, solidaritas, dan integritas moral melalui proses pendidikan yang bermakna dan reflektif, filsafat pendidikan humanis dapat menjadi landasan yang kokoh dalam menciptakan generasi anti-korupsi. Maka, pendidikan bukan hanya menjadi instrumen pembangunan, melainkan juga sebagai jalan peradaban yang memuliakan manusia dan melindungi kehidupan sosial dari kehancuran etis seperti korupsi (Rahmatia, 2022).

Akar Filosofis dan Nilai-nilai Etis dalam Pendidikan Humanis

Akar Barat

Pendidikan humanis dalam tradisi Barat memiliki akar yang kuat dalam pemikiran filsuf-filsuf klasik seperti Sokrates dan Plato. Sokrates dikenal dengan pendekatan dialogisnya, yang disebut *elenchus*, yaitu metode bertanya untuk menggugah kesadaran dan membimbing individu mencapai pemahaman diri yang lebih dalam. Baginya, pendidikan bukan proses indoktrinasi, melainkan pencarian kebenaran yang dilakukan secara reflektif dan interaktif. Sokrates percaya bahwa pengetahuan sejati adalah kebajikan (*virtue*) dan dengan mengenal kebaikan, manusia terdorong untuk melakukan kebaikan pula. Sementara itu, Plato dalam karyanya *Republic* menekankan

pentingnya pendidikan sebagai alat untuk membentuk jiwa yang adil dan harmonis. Ia membagi jiwa manusia ke dalam tiga bagian: rasional, emosional, dan keinginan; dan pendidikan harus mampu menyeimbangkan ketiganya agar manusia menjadi pribadi yang utuh dan bermoral. Dalam filsafat mereka, pendidikan adalah proses internalisasi nilai-nilai luhur, bukan sekadar pemberian informasi.

Akar Islam

Dalam khazanah Islam, pendidikan humanis juga memiliki dasar yang kuat, terutama dalam konsep *tarbiyah*. *Tarbiyah* berasal dari akar kata *rabb*, yang berarti pemelihara, pendidik, dan pemberi petunjuk. Pendidikan dalam pandangan Islam tidak hanya bertujuan mencerdaskan akal, tetapi juga menyucikan jiwa dan membina akhlak. Ulama seperti Al-Ghazali menekankan bahwa pendidikan harus mengarah pada pengenalan Allah, penguatan iman, dan pembentukan karakter yang mulia. Pendidikan adalah proses penyempurnaan manusia (insan kamil) agar ia mampu menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai tauhid, keadilan, dan kasih sayang. Dalam konteks ini, pendidikan humanis Islam tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga spiritual dan transformative, seperti mengajak manusia untuk mengenali dirinya, Tuhannya, dan tanggung jawabnya terhadap masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan dalam Islam sejati mencakup dimensi etika, sosial, dan spiritual yang saling terkait dan tak terpisahkan.

Nilai-nilai Etnis

Dari kedua akar filsafat tersebut, baik Barat maupun Islam, muncul sejumlah nilai-nilai etis yang menjadi inti pendidikan humanis. Nilai empati, misalnya, menjadi fondasi penting agar peserta didik mampu memahami perasaan dan kebutuhan orang lain, yang kelak membentuk kepekaan sosial dan mencegah perilaku manipulatif seperti korupsi. Nilai tanggung jawab menanamkan kesadaran bahwa setiap

individu memiliki peran moral terhadap diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sosialnya. Sedangkan kejujuran merupakan dasar dari integritas pribadi yang kokoh, tanpa kejujuran tidak mungkin ada kepercayaan, dan tanpa kepercayaan, institusi masyarakat tidak dapat berjalan dengan baik. Ketiga nilai ini tidak cukup hanya diajarkan sebagai teori, tetapi harus dihidupkan dalam praktik pendidikan sehari-hari, melalui keteladanan guru, suasana pembelajaran yang dialogis, serta penguatan budaya sekolah yang menjunjung tinggi kemanusiaan. Pendidikan yang mampu menanamkan nilai-nilai etis secara mendalam inilah yang diharapkan dapat menjadi benteng awal dalam mencegah korupsi sejak dini. (Pettalongi, 2013).

Korupsi sebagai Krisis Moral dan Kegagalan Pendidikan

Korupsi tidak semata-mata merupakan pelanggaran hukum, melainkan gejala mendalam dari krisis moral yang mencerminkan lunturnya nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan rasa keadilan dalam kehidupan individu maupun kolektif. Tindakan korupsi lahir dari karakter yang lemah, hasrat pribadi yang tak terkendali, dan mentalitas yang terbiasa mencari keuntungan dengan mengorbankan kepentingan publik. Dalam konteks ini, korupsi adalah ekspresi dari kegagalan pendidikan dalam membentuk manusia bermoral dan berintegritas. Ketika pendidikan hanya difokuskan pada penguasaan kognitif dan pencapaian akademik tanpa dibarengi dengan penguatan nilai-nilai etis, maka hasilnya adalah individu yang cerdas secara intelektual tetapi miskin secara moral. Hal ini mengindikasikan bahwa krisis integritas yang melahirkan korupsi berakar dari sistem pendidikan yang tidak berhasil membentuk kepribadian manusia secara menyeluruh.

Fakta bahwa banyak pelaku korupsi berasal dari kalangan terdidik dan bahkan

menjabat posisi strategis dalam pemerintahan menjadi bukti nyata bahwa keberhasilan akademik tidak selalu sejalan dengan keberhasilan moral. Pendidikan yang menekankan persaingan, prestasi, dan pencitraan sering kali melupakan aspek pembentukan karakter. Sekolah dan perguruan tinggi lebih banyak menjadi tempat reproduksi elite intelektual yang diarahkan pada keberhasilan dunia kerja, tetapi kurang membekali peserta didik dengan kepekaan sosial dan tanggung jawab etis. Di sinilah tampak bahwa pendidikan yang tercerabut dari nilai-nilai kemanusiaan cenderung melahirkan generasi oportunistik yang mudah tergoda untuk menyalahgunakan kekuasaan dan sumber daya demi kepentingan pribadi. Oleh sebab itu, masalah korupsi tidak cukup diselesaikan melalui pendekatan hukum dan pengawasan, tetapi harus dikembalikan pada akar masalahnya, yakni krisis pendidikan nilai dan moralitas.

Kegagalan pendidikan dalam membentuk karakter manusia sejati diperparah dengan sistem pembelajaran yang tidak demokratis dan bersifat instruksional semata. Ketika guru menjadi otoritas tunggal dan peserta didik hanya dituntut patuh tanpa diberi ruang untuk berpikir kritis dan berdialog, maka pendidikan kehilangan fungsinya sebagai ruang pembebasan dan pembentukan watak. Pendidikan yang demikian justru mereproduksi budaya kekuasaan yang sewenang-wenang, yang pada akhirnya menciptakan generasi yang terbiasa tunduk tanpa kesadaran nilai. Akibatnya, ketika mereka kelak berada di posisi pengambil keputusan, mereka mudah terjerumus dalam praktik korupsi karena tidak memiliki fondasi moral yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa pencegahan korupsi harus dimulai dari reformasi paradigma pendidikan itu sendiri, dengan menempatkan nilai-nilai humanis sebagai inti dari proses pembelajaran.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan refleksi dari

kehampaan moral dalam diri manusia yang dihasilkan oleh sistem pendidikan yang gagal memanusiakan manusia. Korupsi adalah bentuk konkret dari ketidakadilan dan pengkhianatan terhadap nilai-nilai luhur yang seharusnya ditanamkan sejak dini. Jika pendidikan tidak diarahkan untuk menumbuhkan integritas, empati, dan tanggung jawab sosial, maka berbagai bentuk penyimpangan seperti korupsi akan terus tumbuh subur, bahkan di tengah masyarakat yang secara formal terdidik. Oleh karena itu, pencegahan korupsi harus dimulai dengan meninjau kembali orientasi pendidikan nasional, yakni dari yang semula berpusat pada capaian teknis menuju pada pendidikan yang membangun kesadaran etis dan keberanian moral untuk menolak ketidakadilan. Inilah urgensi penerapan filsafat pendidikan humanis dalam menjawab krisis korupsi di Indonesia (Suryadi, 2015).

Salah satu contoh konkret yang mencerminkan kegagalan pendidikan dalam membentuk integritas adalah kasus-kasus korupsi yang melibatkan kalangan terpelajar, mulai dari lulusan perguruan tinggi ternama hingga para pejabat yang menempuh pendidikan formal tinggi. Sebagai ilustrasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa kali mengungkap kasus korupsi yang melibatkan mantan rektor, guru besar, hingga pejabat kementerian yang berlatar belakang akademik mentereng, namun ternyata terjerat dalam praktik korupsi berjamaah. Fakta ini menandakan bahwa kecerdasan intelektual tanpa fondasi etika hanyalah sebilah pedang bermata dua yang tajam untuk mencapai posisi, namun membahayakan jika tak diarahkan oleh nilai moral. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika korupsi disebut sebagai gejala akut dari krisis moral dan cacatnya pendidikan karakter. Krisis ini adalah sinyal kuat bahwa sistem pendidikan kita harus kembali ke akar filosofisnya, yakni membentuk manusia yang tidak hanya

berpikir, tetapi juga merasa dan bertindak secara etis. Tanpa pendidikan moral yang hidup dalam praktik, pendidikan hanya akan melahirkan generasi cendekia tanpa hati, birokrat tanpa integritas, dan pemimpin tanpa nurani.

Relevansi Pendidikan Humanis terhadap Pencegahan Korupsi

Pendidikan humanis memiliki relevansi yang sangat kuat terhadap upaya pencegahan korupsi karena pendekatan ini tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi lebih dalam lagi menekankan pada pembentukan kepribadian dan karakter manusia seutuhnya. Dalam kerangka pendidikan humanis, peserta didik diperlakukan sebagai subjek yang aktif, reflektif, dan memiliki potensi moral untuk berkembang. Dengan pendekatan yang partisipatif dan dialogis, peserta didik tidak hanya diajak memahami nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas, tetapi juga menginternalisasi dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam praktiknya, implementasi pendidikan humanis dalam konteks pencegahan korupsi dapat dilakukan melalui pendekatan-pendekatan pedagogis yang mendorong keterlibatan aktif peserta didik dalam memahami dan menginternalisasi nilai-nilai antikorupsi. Beberapa metode yang relevan antara lain diskusi nilai (*values clarification*), di mana siswa diajak untuk mengeksplorasi, mengkritisi, dan memperkuat komitmen terhadap nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan dalam konteks kehidupan nyata. Selain itu, metode *role play* atau bermain peran juga efektif untuk membangun empati dan kesadaran situasional terhadap dilema moral yang sering muncul dalam kehidupan sosial dan pemerintahan. Metode studi kasus dan debat etika juga dapat digunakan untuk merangsang pemikiran kritis dan kemampuan mengambil keputusan secara bermoral. Dengan menggunakan pendekatan-pendekatan tersebut secara

konsisten dalam lingkungan pembelajaran yang dialogis dan suportif, pendidikan humanis tidak hanya membentuk pengetahuan kognitif siswa tentang korupsi, tetapi juga membangun sikap dan keterampilan moral yang menjadi benteng utama dalam mencegah mereka dari terjerumus ke dalam praktik-praktik koruptif di masa depan.

Pendidikan seperti ini sangat efektif untuk menumbuhkan kesadaran diri dan tanggung jawab sosial, yang pada akhirnya menjadi benteng utama dalam menghadapi godaan korupsi di berbagai lini kehidupan.

Salah satu keunggulan pendekatan humanis dalam pendidikan adalah kemampuannya membentuk kesadaran kritis (*critical consciousness*), sebagaimana dikembangkan oleh Paulo Freire. Kesadaran ini memungkinkan peserta didik untuk memahami kondisi sosial secara mendalam, termasuk struktur ketidakadilan yang menopang praktik korupsi. Mereka tidak hanya belajar untuk tunduk pada hukum, tetapi juga memahami mengapa kejujuran dan tanggung jawab harus dijunjung tinggi sebagai wujud penghormatan terhadap martabat manusia. Pendidikan yang membangun kesadaran semacam ini akan mendorong peserta didik menjadi warga negara yang aktif, kritis terhadap penyimpangan, dan berani mengambil sikap etis dalam menghadapi situasi dilematis. Ini adalah fondasi penting bagi gerakan kultural dalam pemberantasan korupsi yang bersifat jangka panjang dan berkelanjutan.

Lebih jauh, pendidikan humanis mendorong terciptanya lingkungan belajar yang adil, terbuka, dan berorientasi pada pembebasan. Dalam sistem pendidikan yang demikian, tidak ada ruang bagi praktik manipulatif, ketimpangan relasi kuasa, atau penyalahgunaan wewenang yang sering kali menjadi cikal bakal praktik koruptif di level kecil. Ketika peserta didik terbiasa hidup dalam suasana yang menjunjung tinggi transparansi,

dialog, dan keadilan, maka nilai-nilai tersebut akan membentuk watak dan cara pandang mereka terhadap kehidupan sosial secara umum. Mereka akan cenderung menolak praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip etika, bahkan ketika mereka memiliki peluang untuk melakukan korupsi. Inilah kekuatan pendidikan humanis sebagai sarana preventif yang bekerja melalui transformasi individu menuju masyarakat yang lebih bermoral.

Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip pendidikan humanis dalam sistem pendidikan nasional, Indonesia dapat membangun generasi yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga kuat dalam prinsip moral dan etika. Pendidikan bukan lagi sekadar alat mobilitas sosial atau pencapaian status, tetapi menjadi media pembentukan manusia yang bermakna dan bertanggung jawab terhadap dirinya, masyarakat, dan negara. Relevansi pendidikan humanis terhadap pencegahan korupsi terletak pada kemampuannya menyentuh dimensi terdalam manusia (kesadaran, hati nurani, dan komitmen terhadap kebaikan bersama). Oleh karena itu, pendidikan humanis bukan hanya alternatif, tetapi sebuah kebutuhan mendesak dalam merancang strategi pencegahan korupsi yang lebih efektif dan berkelanjutan (Hasan dkk., 2024).

Implikasi dan Rekomendasi

Penerapan filsafat pendidikan humanis dalam upaya pencegahan korupsi membawa implikasi mendalam terhadap seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan, baik pada level kurikulum, metode pembelajaran, maupun orientasi kelembagaan. Pendidikan tidak lagi dapat dijalankan sebagai proses mekanistik yang menitikberatkan pada pencapaian akademik semata, melainkan harus direorientasikan menjadi ruang pembentukan manusia yang utuh dan bermoral. Hal ini menuntut perubahan paradigma dari sekadar mendidik untuk

menjadi “pandai” menuju mendidik agar menjadi “benar”. Implikasi ini juga menuntut para pendidik agar tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi sebagai fasilitator nilai, pembimbing moral, dan teladan etis yang mampu menginspirasi peserta didik dalam menjalani kehidupan yang jujur dan bertanggung jawab.

Dalam konteks kebijakan pendidikan, perlu dilakukan evaluasi dan reformulasi terhadap kurikulum agar secara eksplisit memuat nilai-nilai etika, integritas, keadilan, dan kesadaran sosial sebagai komponen inti. Nilai-nilai ini tidak cukup hanya diajarkan secara teoritis dalam mata pelajaran tertentu, tetapi harus diintegrasikan dalam seluruh proses pembelajaran lintas mata pelajaran. Praktik pembelajaran harus bersifat partisipatif, kontekstual, dan mengedepankan dialog sebagai sarana pembentukan kesadaran kritis. Selain itu, lingkungan sekolah dan perguruan tinggi juga harus mencerminkan tata kelola yang transparan, bebas dari praktik koruptif sekecil apapun, agar nilai-nilai yang diajarkan dapat tertanam melalui keteladanan nyata dalam keseharian.

Rekomendasi lainnya adalah pentingnya pelatihan dan penguatan kapasitas etika bagi tenaga pendidik, baik guru maupun dosen, agar mereka mampu menginternalisasi nilai-nilai pendidikan humanis dalam peran profesionalnya. Guru dan dosen perlu dibekali bukan hanya dengan keterampilan mengajar, tetapi juga dengan pemahaman filsafat pendidikan yang mendalam, agar mampu membimbing peserta didik secara komprehensif. Lembaga pendidikan tinggi yang mencetak tenaga pendidik juga harus memastikan bahwa pendidikan moral dan etika menjadi bagian dari kompetensi dasar lulusan. Di samping itu, diperlukan sinergi antara lembaga pendidikan, masyarakat, dan pemerintah dalam membangun budaya antikorupsi melalui berbagai program pendidikan karakter yang berkelanjutan.

Penerapan pendidikan humanis sebagai strategi pencegahan korupsi bukan hanya menjadi tanggung jawab institusi pendidikan, tetapi juga seluruh ekosistem sosial yang mendukung terbentuknya manusia bermoral. Pemerintah, melalui kebijakan publik, harus memberikan dukungan penuh terhadap upaya reformasi pendidikan yang berorientasi pada nilai. Dunia usaha, media, serta tokoh-tokoh masyarakat juga perlu terlibat dalam membangun narasi yang mendorong integritas dan antikorupsi sebagai bagian dari kehidupan berbangsa. Rekomendasi ini menegaskan bahwa pendidikan humanis tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus dikawal dalam kerangka transformasi budaya dan sosial yang lebih luas, demi terciptanya generasi masa depan yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga bermartabat dan bebas dari perilaku koruptif (Rohmah dkk., 2022).

Salah satu contoh implementasi konkret dari pendekatan pendidikan humanis untuk pencegahan korupsi dapat dilihat dalam program “Sekolah Integritas” yang dikembangkan oleh KPK bekerja sama dengan sejumlah sekolah di berbagai daerah. Dalam program ini, guru-guru dilatih untuk mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi ke dalam mata pelajaran secara kontekstual, seperti melalui analisis cerita rakyat tentang kejujuran dalam pelajaran Bahasa Indonesia, atau simulasi pengelolaan anggaran kelas dalam pelajaran Matematika. Selain itu, siswa juga dilibatkan dalam forum diskusi nilai, proyek kewarganegaraan, dan kegiatan OSIS yang menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pendekatan ini tidak hanya menanamkan kesadaran antikorupsi secara teoretis, tetapi juga mempraktikkannya dalam aktivitas sehari-hari di lingkungan sekolah, sehingga siswa belajar bahwa nilai integritas bukan sekadar konsep moral, melainkan gaya hidup yang harus dijalankan secara konsisten dalam setiap aspek kehidupan.

DAFTAR RUJUKAN

- Adela, D. (2021). *Buku Ajar Filsafat Pendidikan*. Nusa Putra Press.
- Arsyad, G., Parwito, P., Kadir, M. I., Milia, J., Yuza, E. Y., & Lubis, D. S. H. (2024). *Pendidikan Antikorupsi (Melawan Korupsi Demi Negeri)*. Mega Press Nusantara.
- Astuti, S. I. (2010). Pendekatan holistik dan kontekstual dalam mengatasi krisis karakter di Indonesia. *Cakrawala Pendidikan*, 3, 84129.
- Asy'arie, B. F. (2024). Menelaah Filsafat Pendidikan Islam Sebagai Filsafat Khusus. *Jurnal Diskursus Islam*, 12(3), 431–450. <https://doi.org/10.24252/jdi.v12i3.46481>
- Atmoko, D., & Syauket, A. (2022). Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi ditinjau dari perspektif dampak serta upaya pemberantasan. *Binamulia Hukum*, 11(2), 177–191.
- Budiarto, G. (2020). Indonesia dalam pusaran globalisasi dan pengaruhnya terhadap krisis moral dan karakter. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 13(1), 50–56. <https://doi.org/10.21107/pamator.v13i1.6912>
- Danil, E. (2021). *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya - Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Danu, T. (2021). *Konsep Humanisasi Pendidikan Dalam Pemikiran Paolo Freire Dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Islam Transformatif* [PhD Thesis, UIN Raden Intan Lampung]. <http://repository.radenintan.ac.id/15434/>
- Fadli, R. V. (2020). Tinjauan filsafat humanisme: Studi pemikiran paulo freire dalam pendidikan. *Reforma: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 9(2), 96–103.

- Fios, F. (2012). Keadilan hukum Jeremy Bentham dan relevansinya bagi praktik hukum kontemporer. *Humaniora*, 3(1), 299–309. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v3i1.3315>
- Ganitri, N. T., Gresia, C., Suliyanti, P., & Ariesandro, G. (2022). Krisis Moral Praktik Korupsi Di Indonesia Dan Hubungannya Terhadap Sikap Altruisme Bangsa: Studi Kasus Korupsi Dana Bansos Covid-19 Oleh Mensos Juliari Batubara. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 1(01). <http://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/46>
- Hariyasasti, Y., Setyawati, L., & Widyawati, N. S. (2025). Aliran-aliran Filsafat Pendidikan dan Tokohnya: Kajian Literature Review. *PROFESOR: Professional Education Studies and Operations Research*, 2(01), 1–19.
- Hasan, Z., Wijaya, B. S., Yansah, A., Setiawan, R., & Yuda, A. D. (2024). Strategi Dan Tantangan Pendidikan Dalam Membangun Integritas Anti Korupsi Dan Pembentukan Karakter Generasi Penerus Bangsa. *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(2), 241–255. <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i2.1883>
- Hidayat, R., & Nasution, H. S. (2016). *filsafat pendidikan islam: Membangun konsep dasar pendidikan Islam*. <http://repository.uinsu.ac.id/7594/>
- Hikmawan, F. (2017a). Perspektif filsafat pendidikan terhadap psikologi pendidikan humanistik. *Jurnal Sains Psikologi*, 6(1), 128781. <https://doi.org/10.17977/um023v6i12017p31-36>
- Hikmawan, F. (2017b). Perspektif filsafat pendidikan terhadap psikologi pendidikan humanistik. *Jurnal Sains Psikologi*, 6(1), 128781. <https://doi.org/10.17977/um023v6i12017p31-36>
- Indriyani, N. (2022). Konsep Pendidikan Merdeka Belajar Dalam Pandangan Filsafat Humanisme. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 7(2), 668–682.
- Kristiawan, M. (2016). Filsafat Pendidikan. Yogyakarta: Valia Pustaka. https://www.academia.edu/download/49370614/NASKAH_FILSAFAT_PENDIDIKAN.pdf
- Mayasari, S. (2017). Filsafat Pendidikan Humanisme Dalam Perspektif Pembelajaran Bahasa Inggris Bagi Peserta Didik Di Tingkat Sekolah Menengah Atas: Sebuah Kajian Teori. *Jurnal Dosen Universitas PGRI Palembang*. <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/prosiding/article/view/1069>
- Muslich, M. (2022). *Pendidikan Karakter: Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional*. Bumi Aksara.
- Muttaqin, M. F., Sari, I., & Wahyudi, A. (2024). *Pendidikan Anti Korupsi*. AMERTA MEDIA.
- Muzakky, H. (2021). *Kurikulum 2013 Dalam Perspektif Pendidikan Humanisme Paulo Freire* [PhD Thesis, IAIN Kediri]. <https://etheses.iainkediri.ac.id/7859/>
- Nahdiyah, A. C. F., Prasetyo, S., Wulandari, N. F., & Chairy, A. (2023). Konsep Pendidikan Perspektif Filsafat Humanisme dalam Kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM). *Jurnal Filsafat Indonesia*, 6(2), 143–151. <https://doi.org/10.23887/jfi.v6i2.56092>

- Nursikin, M. (2016). Aliran-aliran filsafat pendidikan dan implementasinya dalam pengembangan kurikulum pendidikan islam. *ATTARBIYAH: Journal of Islamic Culture and Education*, 1(2), 303–334.
- Pettalongi, S. S. (2013). Islam dan Pendidikan Humanis dalam resolusi konflik sosial. *Cakrawala Pendidikan*, 2, 95142.
- Rahmatia, S. R. D. (2022). Konsep Pendidikan Humanisme Dalam Pengembangan Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Ar-Rasyid*, 7(1), 1–9.
- Rohmah, N. N. S., Muckromin, A., & Fauziyati, E. (2022). Filsafat humanisme dan implikasinya dalam konsep merdeka belajar. *Jurnal Mitra Swara Ganesha*, 9(2), 135–143.
- Siswadi, G. A. (2023). *Merayakan Kemerdekaan dalam Belajar*. Nilacakra.
- Suryadi, B. (2015). Pendidikan karakter: Solusi mengatasi krisis moral bangsa. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 3(2), 71–84.
- Zaini, N. (2019). Konsep Pendidikan Humanis dan Implementasinya dalam Proses Belajar Mengajar. *Karangan: Jurnal Bidang Kependidikan, Pembelajaran, Dan Pengembangan*, 1(01), 62–72.
<https://doi.org/10.55273/karangan.v1i01.7>